

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al. Wisnubruto. 2014. *Praktis Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)*.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram,
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Siti Khotijah. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Lingkar Media. Bantul.
- Sugeng Purbawanto. 2020. *Media Transmisi Telekomunikasi*. Deepublish. Yogyakarta.

- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Suyanto, 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Jakarta.
- Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia. Bandung.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia)*. Sertara Press. Malang.
- Vera Rimbawani Sushanty. *Buku Ajar Hukum Perijinan*, UBHARA Press. Surabaya.
- Y.Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.

#### **ARTIKEL MAJALAH ILMIAH**

- Tandi Arion. Indarja. Retno Saraswati, *Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*. Diponegoro Law Journal, Vol. 5 Nomor3. Tahun 2016. hlm. 9.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.